

» metropol «

Tabung Gas Semburkan Gas Panas

JAKARTA — Tak hanya ledakan yang bisa ditimbulkan dari gas ukuran 3 kg, tapi juga semburan gas panas. Hal ini terjadi pada Senin (5/7), di RT 8/01 Meruya Selatan, Joglo, Jakarta Barat. Akibatnya, seorang pemilik warteg mengalami luka bakar karena tabung gas melon itu menyemburkan gas panas saat hendak dipakai. Jaenah (50) mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangannya. Menurut adik korban,

Darkasih (43), saat itu Jaenah hendak mengganti tabung gas yang habis. Ketika hendak melepas regulator dan akan memasangnya di tabung gas baru, tiba-tiba tabung gas tersebut menyemburkan asap. "Asap itu *kayaknya* gas panas," katanya. Jaenah tidak bisa menghindar karena posisinya waktu itu membungkuk. "Semburan itu langsung mengenai muka dan tangan," kata Darkasih. Dua orang yang bekerja di sana, Siti Annisa dan Nur Hamida, tak ikut menjadi korban. Mereka langsung berteriak minta tolong setelah semburan gas panas itu melukai Jaenah. Oleh warga, korban kemudian di bawa ke Klinik Safira yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian. ■ c22

Banyak Aparat TNI-Polri Terlibat Narkoba

JAKARTA — Jumlah aparat Polri dan TNI yang terlibat dalam peredaran narkoba cukup tinggi. Hal itu diungkapkan Pangdam Jaya, Mayjen Marciano Norman, dalam acara sosialisasi pencegahan narkoba bagi anggota TNI dan Polri di Main Hall Mapolda Metro Jaya, Rabu (4/8). Atas dasar itu, pihaknya menyambut baik adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. "Indonesia

salah satu negara tujuan pengedaran narkoba. Salah satu wujud nyata program pelatihan ini diharapkan muncul aparat yang andal. Paling tidak di lingkungan tempat kerja kita aman dari peredaran narkoba," ujar Norman saat memberi sambutan. Menurut Pangdam, langkah pencegahan narkoba perlu dilakukan mulai dari lingkungan pribadi, keluarga, dan tempat kerja. Karena itu, langkah sosialisasi internal di TNI-Polri penting untuk dilakukan. "Jumlah aparat TNI-Polri yang terlibat sebagai pengguna ataupun pengedar narkoba masih cukup tinggi. Karena itu, acara ini penting untuk dilakukan. Kita perlu untuk bersihkan halaman rumah (institusi) dulu," ujarnya. ■ abdullah sammy, ed: subroto



ANTREAN PENUMPANG
Sejumlah penumpang sedang mengantri di Halte Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (4/8). Akibat penumpukan penumpang di halte cenderung rawan terjadinya pelecehan seksual yang mengancam para penumpang khususnya wanita.

Polda Metro Dukung Perda DKI

Abdullah Sammy/
Muhammad Fakhruddin

Polisi akan melakukan penertiban.

JAKARTA — Tempat hiburan malam diwajibkan tutup selama ibadah puasa di bulan Ramadhan. Hal tersebut ditegaskan Polda Metro Jaya lewat juru bicaranya, Kombes Pol Boy Rafli Amar. "Sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, tempat hiburan malam harus tutup selama pelaksanaan ibadah puasa. Polisi bersama pemda akan mengawasi pelaksanaan aturan tersebut," ujarnya kepada sejumlah wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (4/8).

Menurut Boy, wewenang utama terletak pada pemerintah daerah. Polisi, ujarnya, akan memberikan bantuan, terutama dalam kegiatan penertiban.

Dia menambahkan, semua wewenang penertiban telah diatur dalam undang-undang. Karenanya, pihak kepolisian tidak menolerir adanya aksi main hakim sendiri yang dilakukan organisasi dan kelompok masyarakat.

"Semua telah diatur dalam undang-undang. Yang berwenang untuk melakukan penertiban hanyalah pemda, dalam hal ini satpol PP dan polisi. Kita harus hormat dan percaya pada aparat penertiban," katanya.

Polda Metro Jaya juga akan mempertemukan sejumlah pengusaha hiburan malam dengan ulama dan tokoh masyarakat di Mapolda Metro Jaya. Kegiatan ini akan dimediasi langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Timur Pradopo.

Rencananya, temu pengusaha hiburan dengan ulama akan dilaksanakan dua hari sebelum pelaksanaan ibadah suci di bulan Ramadhan. "Dalam acara itu akan dibuat kese-

pakatan mengenai komitmen untuk menutup tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan," kata Boy Rafli.

Polisi, lanjut Boy, akan mengawasi pelaksanaan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tempat hiburan malam melanggar isi aturan, dengan tetap membuka tempat usahanya, Polda Metro Jaya akan melayangkan sanksi tegas.

"Semua telah diatur dalam undang-undang. Kami akan membantu pelaksanaan aturan itu bersama Pemda," ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga akan dibuat komitmen bersama untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri terkait penertiban tempat hiburan malam. "Kami juga berkomitmen begitu juga ormas. Kami harap ada kepercayaan pada aparat berwenang dalam penegakan aturan," kata Boy.

Penertiban pengemis

Selain menerbitkan perda soal pelanggaran tempat hiburan malam selama Ramadhan, Pemerintah Provinsi DKI juga mengintensifkan penertiban pengemis dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Hingga saat ini, PMKS yang terdata sekitar 8.000 jiwa.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Effendi Anas mengaku tengah berkoordinasi dengan aparat polisi dan Dinas Sosial DKI Jakarta untuk menggelar razia besar-besaran di lima wilayah kota. Selain untuk mempersempit ruang gerak pengemis, langkah ini bertujuan sebagai antisipasi membludaknya jumlah pengemis yang masuk ke Jakarta saat bulan suci hingga menjelang Lebaran.

Beberapa titik yang merupakan lokasi berkumpulnya para PMKS telah masuk target operasi. "Di antaranya perempatan Coca-Cola, perempatan Pejompongan, simpang lima Senen, dan perempatan Jatibaru," kata Effendi. ■ ed: subroto

Harga Daging dan Ayam Melonjak

JAKARTA — Menjelang bulan Ramadhan, harga daging sapi dan ayam mulai merangkak. Di Pasar Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, kenaikan daging sapi sudah berlangsung sejak satu minggu terakhir.

Pedagang ayam pasar Slipi, Wiracandra, mengatakan, kenaikan pada daging ayam pun mulai signifikan. Biasanya, kata dia, dari 20 ekor ayam hidup yang dijualnya, bisa habis dalam satu hari. Namun, sudah tiga hari ayam itu tak kunjung dibeli. "Pembeli turun drastis karena harga terlalu tinggi," katanya.

Harganya sudah berkisar Rp 28 ribu hingga Rp 33 ribu per ekor. Hal yang sama juga terjadi pada daging sapi. Mulyadi, pedagang daging sapi mengatakan kisaran harga sudah mencapai Rp 70 ribu dari harga awal Rp 60 ribu.

"Ada kemungkinan bisa naik lagi pekan depan menjadi Rp 80

ribu," ungkapnya.

Selain itu, faktor pasokan dari daerah juga ikut berperan. Para pedagang mengaku kesulitan. Diperkirakan, pasokan ayam menurun hingga 40 persen, sedangkan daging sapi mencapai 50 persen.

"Untuk ayam, saya sampai mencari ke Sukabumi, Jawa Barat, tapi *nggak* dapat," kata Arman, pedagang ayam hidup. Ia juga mengatakan, ayam berukuran kecil sudah sulit diperoleh.

Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat menilai kenaikan harga itu terlalu tinggi. "Harganya juga tidak wajar," katanya saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Puri Kembangan dan Pasar Slipi, Palmerah.

Menurut dia, kenaikan harga di dua pasar yang diinspeksi merata. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan dari harga pasaran. "Kisaran kenaikannya sama," ujarnya.

Meskipun mengetahui kenaikan itu, Kusdiana mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab, harga lebih banyak ditentukan oleh pasar daripada pemerintah. Namun, ia menduga faktor biaya produksi dan biaya pakan yang meningkat mempengaruhi hal tersebut. "Pengusaha besar yang punya peran dalam permainan harga, seharusnya pemerintah bisa menekan para peternak itu," katanya saat menyidik Pasar Slipi.

Kusdiana mengatakan, sidak ini dilakukan untuk pengawasan ketersediaan daging di pasar. "Sejauh ini, pasokan daging untuk Jakarta Barat masih cukup."

Rencananya, sidak akan berlangsung hingga 10 Agustus mendatang. Dari 51 pasar yang ada di Jakarta Barat, sidak pertama dilakukan di dua pasar, yaitu, Pasar Puri, Kembangan dan Pasar Slipi, Palmerah. "Semua pasar di Jakbar akan disidak," katanya.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menaruh curiga jika ada ayam dijual dengan harga di bawah standar. "Masyarakat sebaiknya teliti membeli daging dan ayam," katanya.

Jika ayam berwarna biru, ada kemungkinan merupakan ayam tiren. Begitu pula, jika harga ayam di bawah standar. Untuk satu ekor ayam, harga normal berkisar Rp 28 ribu. Jika dipotong delapan bagian, harganya sekitar Rp 3.500 per potong.

"Kalau harga di bawah itu, patut curiga," katanya.

Dari dua pasar yang disidak, Kusdiana belum menemukan ayam atau daging yang dianggap mencurigakan dan tak layak konsumsi. Namun, hal ini bukan berarti kemungkinan peredarannya tidak terjadi.

"Saya belum bisa menyimpulkan karena masih ada puluhan pasar yang belum disidak," katanya. ■ c22, ed: subroto



FOGGING
Seorang petugas jumentik sedang menyemprotkan insektisida di daerah Pangkalan Jati, Jakarta Timur, Rabu (4/8). Penyemprotan dilakukan untuk menekan korban DBD karena Jakarta Timur mendapatkan peringkat pertama untuk daerah rawan DBD.

Puluhan Puskesmas Jakarta Timur Belum Layak

JAKARTA — Puluhan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Jakarta Timur dinilai belum layak. Kondisi bangunan yang tua, ditambah dengan jumlah pasien yang membludak membuat pelayanan tidak optimal.

Puskesmas Utan Kayu Selatan, misalkan, tempatnya bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah. Bau menyengat sampah kerap mengganggu pasien yang sedang berobat. Bangunannya juga sudah tua. Langit-langit ruang tamu di puskesmas tersebut kerap menjatuhkan rontokan-rontokan kayu yang diduga termakan rayap.

Pelaksana Harian Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Wiwiek Herytha, mengatakan, di Jakarta Timur saat ini terdapat 88 puskesmas yang terdiri atas 10 puskesmas kecamatan dan 78 puskesmas kelurahan.

"Baru 15 persen yang telah direhab total dan berat," terangnya, Rabu (4/8).

Bila dihitung, jumlah puskesmas yang layak baru men-

capai 15 sampai 20 puskesmas. Puskesmas yang dipandang layak seperti di Kelurahan Jati II yang baru saja diresmikan Wali Kota Jakarta Timur, Murdhani.

Puskesmas itu berdiri di atas tanah wakaf Almarhum Haji Ahmad Bangkit. Dia adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah. Tanah tersebut diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta tahun 1978 dengan luas 375 meter persegi. Pada 1979 di atas tanah itu dibangun puskesmas dengan anggaran Inpres dan pembangunannya rampung tahun 1980.

Sebelumnya, Wiwiek menilai, kondisi bangunan Puskesmas Kelurahan Jati II sudah sangat tidak layak. Pada bagian atapnya sudah mau ambrol dan rawan ambruk, sehingga membahayakan petugas kesehatan dan masyarakat yang datang berobat.

Baru 2009 Puskesmas Kelurahan Jati II direhab total dari anggaran Sudin Kesehatan Jakarta Timur. "Puskesmas dibangun dua lantai dengan

luas bangunan 256 m2 dan kekuatan daya listrik 12.000 watt," katanya.

Wiwiek mengatakan, kunjungan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup tinggi. Pada 2009, menurut Wiwiek, kunjungan pasien ke poliklinik umum tidak kurang dari 12.000 orang, poliklinik gigi sekitar 1.100 orang, dan pelayanan KB sebanyak 539 orang. Sementara, poliklinik kesehatan ibu dan anak (KIA) tidak lebih dari 216 orang, dan pelayanan obat mencapai 10 ribu orang.

"Untuk pengguna kartu Gakin yang dilayani mencapai 1.078 orang dari 8.000 orang di Kecamatan Pulo Gadung," ujarnya.

Puskesmas Kelurahan Jati II dilayani enam orang petugas kesehatan dan dua orang petugas harian lepas (PHL). "Pihak Puskesmas saat ini belum memiliki asisten apoteker, namun sudah diajukan ke Dinas Kesehatan DKI," ujarnya.

Wali Kota Jakarta Timur Murdhani mengharapkan

Puskesmas dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, meskipun masih banyak kekurangan infrastruktur. Agar dapat menjalankan fungsinya, puskesmas kata Wali Kota, harus dirawat tidak hanya oleh petugas yang ada namun juga masyarakat setempat.

Pesan tersebut disampaikan wali kota saat menghadiri kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian puskesmas bersih dan sehat, sekaligus peresmian Puskesmas Jati II, di Jl Kaplongan II, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung.

Wali Kota mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, petugas di puskesmas juga diharapkan dapat memberikan contoh dan keteladanan dalam menjaga kebersihan kepada masyarakat di sekitar puskesmas itu berada.

"Pelayanan agar dilakukan dengan ramah," terangnya. Dia mengatakan keramahan petugas bisa menjadi salah satu obat memberikan kesembuhan pasien. ■ c29, ed: subroto